



► PENATAAN MALIOBORO

Isa Nangis Tenan Nek Libur Suwe

GONDONANAN—Sejumlah pedagang kaki lima (PKL) yang berada antara Pasar Beringharjo hingga Titik Nol Kilometer merasa berat hati jika harus dipindah saat Pemda DIY menata Malioboro tahap kedua

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

PKL berharap Pemda DIY dan pelaksana proyek dapat memberikan solusi terbaik agar mereka tetap bisa bekerja, utamanya Sabtu, Minggu dan hari libur.

Di kawasan jalur yang akan ditata tersebut kondisi PKL sedikit berbeda dengan penataan tahap pertama. Lebih dari separuh jalur semi pedestrian yang akan direvitalisasi ini dipenuhi PKL. Sehingga, jumlah PKL yang harus ditata saat ini lebih banyak daripada di penataan tahap pertama.

Mereka banyak memanfaatkan ruang minim antara satu hingga dua meter persegi seperti yang dilakukan Tutik, seorang pedagang oleh-oleh makanan khas Jogja.

Kabar akan dilakukan penataan telah lama didengar Tutik, apalagi beberapa hari lalu sudah ada petugas pelaksana proyek yang memberikan tanda dengan pengecatan warna putih di sejumlah titik jalur.

► Jumlah PKL yang harus ditata saat ini lebih banyak daripada di penataan tahap pertama.

► Pemda DIY akan menyiapkan di eks Bioskop Indra sebagai lokasi berjualan sementara bagi PKL

Tutik tidak bisa berbuat banyak dan akan menuruti kebijakan pemerintah. Namun ia berharap, pemerintah memberikan solusi yang bijak bagi PKL. "Piye meneh, gelem ra gelem, yo kudu gelem [mau tidak mau ya harus mau ditata]," ungkap Tutik saat ditemui *Harian Jogja*, Rabu (8/3).

Ia belum mendapatkan informasi detail terkait dengan kapan harus libur saat nanti penataan dimulai. Namun, sebagai pedagang yang sudah 18 tahun menggantungkan hidup di Malioboro, ia merasa berat meninggalkan Malioboro meski hanya sehari untuk libur.

Itu tak lain karena besarnya pendapatan yang diperoleh, dengan posisi jualannya yang berukuran tak lebih dari dua meter persegi. Dalam sehari, paling sepi saja ia mendapatkan omzet minimal Rp700.000. Pada saat ramai bisa mencapai Rp7 juta, terutama pada Sabtu, Minggu atau hari libur tanggal merah.

"Dadi isa nangis tenan nek kon libur suwe-suwe [bisa menangis kalau suruh

libur lama-lama],” ujarnya sembari tertawa.

Sembari mengemas bakpia, Tutik mengaku dengan luasan dua meter yang dipakai berjualan, ia hanya membayar retribusi Rp28.000 per bulan. Ditambah bayar listrik Rp2.000 per lampu serta iuran sampah dan lainnya. Bagi Tutik, hal itu tidaklah berat karena termasuk kawasan strategis sehingga banyak pembeli. Karena itu, tawaran pemindahan sementara di eks bioskop Indra, bagi Tutik belum tentu mampu mendatangkan pembeli dengan intensitas yang sama.

Hal yang sama juga disampaikan Muhammad Amin, seorang pemuda yang berjualan aksesoris khas Jogja. Ia memanfaatkan luasan satu meter untuk berjualan di ruas jalur semi pedestrian.

Ia berharap, jika sudah ada keputusan bergantian libur saat proses pembangunan dimulai, khusus untuk Sabtu dan Minggu tetap bisa berjualan. Jika hari biasa ia hanya mendapatkan Rp50.000, namun pada Sabtu Minggu, bisa mencapai Rp500.000 omzet dari dagangan kecilnya.

“Kalau bisa membangunnya jangan lama-lama, kami sih ikut yang terbaik saja. Kalau harus pindah, gimana ya, di sana belum tentu seperti di sini soalnya,” kata pria yang tinggal indekos di Prawirodirjan, Gondomanan ini.

Jualan Sementara

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto

Penataan Malioboro

Tahap Pertama

Panjang

910 METER

Lebar

10.700 METER

Fasilitas

• Terpasang 32 unit lampu budaya

• 94 unit tempat sampah

• 9 pohon gayam dan pohon perdu soka

• Bollard tabung 413 unit.

• Bollard bulat 68 unit.

• 115 kursi sandar dan 54 kursi tanpa sandar.

• Ditanam 71 pohon asam jawa

menjelaskan, Pemda DIY akan menyiapkan di eks Bioskop Indra sebagai lokasi berjualan sementara bagi PKL yang berada di ruas penataan jalur pedestrian. Namun, hal itu masih perlu dikomunikasikan dengan berbagai pihak seperti PKL. Para PKL tentu akan protes jika harus libur tidak berjualan dalam jangka waktu relatif lama.

“Tahap dua kita mau menyelesaikan penataan pasar sore terutama [eks Bioskop] Indra, karena kalau ini belum *dicepakke* [disiapkan], kalau *nek do ra isa* dagang *mesti do protes* [kalau tidak bisa jualan pasti protes]. Nanti mestinya *nek didandani*, dipindah sementara,” ungkapnya.

Tavip menegaskan, pemindahan PKL untuk sementara waktu memang harus dilakukan agar proses penataan Malioboro

bisa berjalan. Ia menyadari pasti ada yang melakukan protes atas rencana pemindahan karena tentu lebih senang berjualan di tempat yang saat ini.

Setelah revitalisasi selesai, nanti para PKL akan dikembalikan namun dengan penataan yang lebih rapi. Seperti bentuk gerobak dan tenda yang disamakan agar terlihat rapi.

“Mesti ada protes karena lebih suka jualan di situ tetapi nek seperti itu kan *ra isa* didandani terus [kalau terus menuruti protes kan Malioboro tidak bisa direvitalisasi]. Indra untuk transit, pembangunan selesai, dikembalikan lagi, tapi [setelah dikembalikan] tidak dengan lapak terpal hijau dan lain-lain, itu ditata desainnya sudah ada,” ungkapnya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005